

**PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN NAGARI MANGGOPHO**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Progam Studi Manajemen
Perdagangan (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya*



OLEH

IRNI FIKA DEWI

NIM. 58098

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERDAGANGAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVESITAS NEGERI PADANG

2015

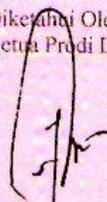
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN NAGARI
MANGGOPOH**

Nama : Irni Fika Dewi
NIM/TM : 58098/2010
Program Studi : Manajemen Perdagangan(DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Diploma III



Perengki Susanto SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Rose Rahmidani, S. Pd, MM
NIP. 19790806 200801 2 013

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

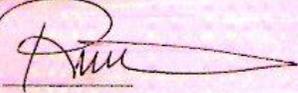
**PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN NAGARI MANGGPOH**

Nama : Iri Fika Dewi
Nim / BP : 58098/2010
Program Studi : Manajemen Perdagangan (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Perdagangan (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Rose Rahmidani, S. Pd, MM	(Ketua)	
2. Rosyeni Rasyid, SE, MM	(Anggota)	
3. Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irni Fika Dewi
NIM/TM : 58098/2010
Tempat/tgl. Lahir : Padang Tarok, 27 Juli 1992
Program Studi : Diploma III
Keahlian : Manajemen Perdagangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih Gg. Belanak No. 17 B ATB Padang
No. Handphone : 082285080227/ 085669004616
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada PT. BPR
Pembangunan Nagari Manggopoh

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani **asli** oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2015

Saya menyatakan,



Irni Fika Dewi
NIM. 58098

ABSTRAK

Irni Fika dewi, 58098/2010 : Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh

Pembimbing : Rose Rahmidani, S. Pd, MM

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Prosedur Pemberian dan pengawasan Kredit yang dilakukan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh, tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan oleh PT. BPR Pembangunan Nagari dalam mengatasi kredit macet.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menguraikan keadaan perusahaan yang bersangkutan, informasi yang telah diperoleh dianalisa berdasarkan teori-teori yang relevan. Data yang penulis dapatkan langsung dari PT. BPR Pembnagunan Nagari Manggopoh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa prosedur pemberian Kredit pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh yaitu diawali dengan permohonan kredit, survey, analisa kredit, rekomendasi kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, dan pengarsipan kredit. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh antara lain, monitoring dari dalam dan luar lingkungan perusahaan. Tindakan yang dilakukan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo dengan cara mengirimkan surat atau menghubungi nasabah agar melunasi kreditnya atau memperpanjang masa kredit. Kebijakan yang dilakukan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dalam mengatasi kredit macet yaitu melakukan penyelamatan dengan cara restrukturisasi kredit dan penyelesaian melalui jalur hukum. Diharapkan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dapat mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan kredit, dan hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk tambahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “**Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh**”. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rose Rahmidani, S. Pd, MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
2. Ibu Rahmiati SE, M.Sc selaku penguji 1 dan Bapak Hendri Andi Mesta SE, Ak, MM selaku penguji 2 serta selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas kritik dan saran yang telah ibu dan bapak berikan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Perengki Susanto SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Bapak Firman SE, M.Sc, selaku sekretaris Program Studi Diploma III Manajemen Perdagangan serta Ibu Vivi selaku Staf Tata Usaha Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

6. Staf Administrasi Program Studi Diploma III, yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
7. Bapak dan Ibu staf perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis banyak kemudahan dalam memperoleh bahan bacaan.
8. Karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis kuliah di Universitas Negeri Padang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Masrir Dt. Panduko Basa dan Ibu Warnita yang telah memberikan segenap kasih sayang, dorongan semangat, doa dan materi kepada penulis.
10. Uda2 dan adikku, daen, dair, dario, daan, sinta yang tak pernah lelah dan letih memberikan motivasi, doa, dan kasih sayangnya serta semangat moril dan materil kepada penulis.
11. Yang tersayang namjachingu (Teguh Tri Arnanda) terimakasih atas waktu, dorongan, dan semangat yang selama ini kau berikan.
12. Teman-teman Prodi Diplma III angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Manajemen dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang dan memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan dari segala pihak dinilai ibadah disisi Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2015

Irni Fika Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bank	8
B. Pengertian Kredit.....	8
C. Unsur-unsur Kredit.....	9
D. Jenis-jenis Kredit	12
E. Tujuan Kredit.....	15
F. Fungsi Kredit	16
G. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	17
H. Resiko Kredit.....	20
I. Penggolongan Kualitas Kredit.....	23
J. Prosedur Pemberian Kredit.....	24
K. Penilaian Kelayakan Kredit	29
L. Teknik Penyelesaian Kredit Macet	32
M. Pengawasan Kredit	35

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Jenis Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Objek Penelitian	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh.....	43
2. Visi dan Misi PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh	44
3. Struktur Organisasi PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh	46
B. Pembahasan	56
1. Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh	56
a. Prosedur Pemberian Kredit	56
b. Prosedur Pengawasan Kredit.....	65
2. Tindakan yang Dilakukan PT. BPR Pembangunan Nagari terhadap kredit nasabah yang telah memasuki Tanggal Jatuh Tempo	66
3. Langkah-langkah yang dilakukan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dalam mengatasi Kredit Macet.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	75
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 : Laporan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh	46
Gambar 1.2 : Gambaran Umum Proses Proses Pemberian Kredit	57
Gambar 1.3 : Gambaran Umum Proses Kredit PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh	65
Gambar 1.4 : Proses PelelanganKredit PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Sesuai dengan fungsinya lembaga ini tidak hanya menyalurkan dana- dana yang dimilikinya, tetapi juga memberikan pelayanan jasa lainnya. Peranan perbankan besar sekali yaitu aktif dalam mendukung dan memperlancar kegiatan usaha. Persaingan bukan hanya upaya untuk mencari keuntungan tetapi juga upaya untuk mencapai tingkat kepuasan nasabah yang merupakan indikator persaingan yang penting.

Disamping itu bank juga merupakan katalisator pembangunan yaitu dengan menyediakan jasa dalam rangka membiayai kegiatan usaha guna memperlancar pelaksanaan arus produk dan jasa bagi sektor perekonomian. Semua hal ini tergantung kemampuan Bank dalam menciptakan dan menjual jasa perbankannya pada masyarakat. Semakin kreatif, semakin banyak jasa pelayanan perbankan yang dapat diciptakan atau dijual akan memperkuat daya saing bank tersebut. Baik bank pemerintah maupun bank swasta dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menawarkan berbagai jenis produk seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan yang lainnya.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah

Indonesia bahkan ke luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersial (*Commercial Bank*).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa- jasa yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit dari pada Bank Umum.

PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh sebagai salah satu perusahaan perbankan yang bergerak dibidang jasa juga mempunyai misi untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang dapat memuaskan nasabahnya. Pihak manajemen PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh sangat menyadari bahwa kepuasan nasabahnya adalah elemen penting dalam menciptakan loyalitas nasabah yang pada gilirannya dapat memacu peningkatan profitabilitas perusahaan perbankan.

Adapun jenis- jenis produk simpanan yang ada pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh sebagai berikut: Deposito Berjangka, Tabungan Kami (TAMI), Tabungan Belajar (TABELA), Tabungan Mandeh Sitti (TAMI), Tabungan Pegawai (TAPEGI), Tabungan Baniat (Tabungan Naik Haji), Tabungan Kumanis, Tabungan Qurban, dan Tabungan Puro Nagari. Dimana semua tabungan tersebut sangat aman untuk nasabah yang menyimpan uang di bank tersebut, serta dengan proses pelayanan yang sangat memuaskan, menjadikan nasabah merasa nyaman setiap kali mau menabung.

Secara umum kegiatan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito kemudian

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan.

Dalam arti luas kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan. Ada dua jenis kepercayaan yang melekat pada usaha bank yaitu kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dan kepercayaan dari bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. Apabila kepercayaan dari bank itu tidak terlaksana dengan baik, maka bank akan menanggung resiko. Resiko tersebut berupa kerugian atas keterlambatan pembayaran cicilan akan kredit macet atau kredit yang tidak dapat ditagih pada saat jatuh tempo, sementara itu uang simpanan dari masyarakat tersebut harus di kembalikan. Pemberian kredit merupakan usaha pokok bank yang besar pengaruhnya dalam kehidupan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat.

Dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan, sampai saat ini PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh telah melaksanakan usaha kredit sebagai berikut: Kredit Usaha Mikro Informal (KUMI), Kredit Usaha Kecil Informal (KUKI), Kredit Cicilan Pegawai (KCP), Kredit Cicilan pegawai Produktif (KCCP), Kredit interen, Kredit Uasaha Mikro Nagari (KUMN), Kredit Jaminan Deposito (KJD), Kredit Jaminan Plasma, dan Kredit Badan Hukum Koperasi.

Tabel 1.1 Kredit Bermasalah pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh (Dlm Ribuan Rp)

No	Keterangan	2011	2012	2013
1.	Lancar	17.927.036	20.045.721	18.713.807
2.	Kurang Lancar	25.400	45.200	65.200
3.	Diragukan	234.900	198.500	352.00
4.	Macet	324.339	815.942	1.265.800
	NPL (%)	10,63%	9,34%	11,92%

Sumber: PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh

Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa NPL pada tahun 2011 sebesar 10,63% sedangkan pada 2012 NPL mengalami penurunan sebesar 9,34% dan pada 2013 NPL PT.BPR Pembangunan Nagari Manggopoh mengalami peningkatan sebesar 11,92%. Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan terjadinya fluktuasi kredit pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh karena disebabkan oleh penurunan suku bunga dan keadaan ekonomi.

Untuk meminimalisir resiko kredit diragukan, kurang lancar dan macet yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank maka perlu kehati-hatian dalam pemberian kredit. Untuk itu bank diwajibkan melaksanakan prosedur pemberian kredit tanpa membeda-bedakan calon debitur. Semakin selektif bank dalam menyalurkan kredit semakin terjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bank sehingga dapat menyalurkan kredit secara maksimal. Semakin besar plafon kredit yang disalurkan oleh suatu bank, semakin besar pula resiko yang harus dipikul oleh bank. Pihak bank selalu dihadapkan pada resiko yang cukup besar apakah dana dan bunga dari kredit yang diberikan akan dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian kredit. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-

tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit di cairkan. Tahapan-tahapan tersebut dikenal juga dengan prosedur pemberian kredit (Kasmir, 2002:95).

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit untuk diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penelitian yang mendalam. Proses pemberian kredit diawali dengan pengajuan permohonan kredit serta melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan bank pada umumnya (Kasmir,2002:95). Setelah permohonan diajukan debitur, maka pihak bank akan melakukan survey dan menganalisa keuangan calon debitur. Selanjutnya pihak bank akan membuat surat perjanjian kredit yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pihak bank dan pihak debitur. Setelah proses tersebut di atas selesai barulah pihak bank merealisasikan kredit yang telah disepakati.

Proses pemberian kredit tidak berakhir setelah kredit tersebut direalisasi, tetapi masih diperlukan pengawasan terhadap kegiatan debitur agar seluruh kredit beserta bunga dapat dibayar sesuai perjanjian. Setiap awal bulan kepala sub bagian kredit membuat daftar pokok pinjaman dan bunga yang harus diangsur nasabah pada bulan tersebut. Dari daftar itu *Account Officer* dapat memantau bagaimana perkembangan kualitas kreditnya, apabila menunjukkan adanya perkembangan yang kurang lancar maka dibuatkan surat tagihan yang berisi perintah kepada nasabah untuk membayar sejumlah tunggakan. *Account Officer* melakukan penagihan dengan mengunjungi

rumah nasabah sehingga dapat mengetahui kondisi usaha nasabah. Dalam kunjungan tersebut selain berfungsi untuk pengawasan kredit juga terdapat fungsi pembinaan kepada nasabah terutama apabila dalam usahanya dijumpai kesulitan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya usaha nasabah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik menjadikan dasar pemikiran dan penulisan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA PT. BPR PEMBANGUNAN NAGARI MANGGOPOH”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh Kepada nasabah?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap kredit nasabah yang telah melewati tanggal jatuh tempo?
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dalam mengatasi masalah kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Prosedur pemberian dan pengawasan Kredit pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh.

- b. Tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo.
- c. Kebijakan-kebijaksanaan yang dilakukan oleh PT. BPR Pembangunan NagariManggopoh dalam mengatasi kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat bagi Penulis
 - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Universitas Negeri Padang.
 - b. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai perkembangan Kredit pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh
2. Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Nagari Manggopoh
 - a. Sebagai salah satu masukan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran, pengawasan dan pembinaan kredit dimasa yang akan datang.
 - b. Sebagai salah satu bentuk ikut andilnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dalam memajukan dan ikut peduli terhadap pendidikan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang kondusif antara institusi pendidikan dengan perbankan
3. Manfaat bagi Pembaca dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah: “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2000 : 3) pengertian bank secara sederhana adalah: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Dari pengertian di atas di jelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara tentang Bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

B. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2012 : 130) kata kredit berasal dari kata Yunani, yaitu “*credere*” atau dalam bahasa latin “*creditum*” yang berarti kepercayaan, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Budi (2005 : 4) kredit adalah meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayar pada saat itu juga. Defenisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit merupakan kegiatan memberi nilai ekonomi kepada seseorang atau badan berdasarkan kepercayaan untuk pengembalian kredit tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

C. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, menurut Ismail (2011:95), ada 7 unsur yang terdapat dalam pemberian kredit yaitu:

1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau

badan usaha. Bank memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (*Trust*)

Kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditor) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Resiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditor.

7. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

Menurut Kasmir (2008:75) ada 5 unsur dalam pemberian kredit:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa akan datang.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya, resiko menjadi tanggungan bank.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atas jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

D. Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2008:77) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi kegunaannya

1. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi, contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

2. Kredit modal kerja

Digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya, contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan barang tambang atau kredit industri lainnya.

2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha, sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit untuk pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

3. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut, kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar, contoh kredit ekspor impor.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Merupakan Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, contohnya untuk peternakan dan pertanian.

2. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun biasanya untuk investasi.

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang jangka waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5

tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit dan manufaktur.

d. Dilihat dari segi Jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha atau *character* serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian masyarakat.

2. Kredit peternakan.

3. Kredit industri, kredit untuk membiayai industri kecil menengah atau besar.

4. Kredit pertambangan, jenis tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

7. Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor-sektor lainnya.

E. Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2012:116), tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dibubarkan.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah:

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menampung tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

F. Fungsi Kredit

Menurut Budi (2005:4) fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

G. Prinsip-prinsip pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:136) penilaian kredit dapat dilakukan menggunakan analisis 5C dan 7P .

1. Analisis berdasarkan 5C sebagai berikut :

a. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. Capacity

Kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering disebut juga dengan *capability*.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rehabilitas dan ukuran lainnya.

d. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang ia jalankan. Penilaian prospek di bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah menjadi relatif kecil.

e. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah, maka jaminan yang akan dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2. Analisis berdasarkan 7P sebagai berikut:

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup *sikap*, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai *prospect* atau tidak. Hal ini penting mengingatkan jika sesuatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai *prospect*, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah untuk mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber dana debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi dari sektor lainnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

H. Resiko Kredit

Menurut Rivai, Basir, dan Sudarto, Veitzal (2012:226) dalam setiap pemberian kredit selalu dihadapkan pada suatu risiko. Untuk itu, seorang *Account Officer* harus mengantisipasi segala risiko yang akan timbul terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah sebelum kredit tersebut diberikan. Berbagai risiko yang perlu diperhatikan oleh seorang *Account Officer* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi enam jenis berikut:

1. Resiko sifat usaha

Setiap jenis usaha mempunyai sifat dan ciri-ciri khusus yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Setiap kegiatan tersebut juga mengandung tingkat risiko yang berbeda pula, dari sifat usaha ini akan

diketahui tinggi/ rendahnya tingkat resiko usaha dengan berbagai kriteria, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- (1) *Turn Over* usaha semakin tinggi, maka semakin tinggi pula resiko usahanya.
- (2) Tingkat spesifikasi/ kekhususan usaha, semakin khusus bidang usaha, semakin tinggi resikonya.
- (3) Investasi barang-barang pada aktiva lancar (modal kerja) akan lebih tinggi resikonya.
- (4) Pada negara berkembang usaha dengan padat modal akan mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha padat karya.
- (5) Usaha yang lebih dinamis seperti perdagangan akan mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi daripada usaha yang tidak begitu dinamis, misalnya perkebunan.
- (6) Kegiatan usaha yang tidak bisa disimpan secara fisik kalau tidak ada pembeli (seperti: *entertainment, show*) akan lebih tinggi resikonya bila dibandingkan dengan usaha yang dapat disimpan secara fisik (seperti: industri tekstil).
- (7) Karena sifat pekerjaan itu sendiri yang mempunyai resiko tinggi, misalnya pengeboran minyak bumi di lepas pantai.

2. Resiko geografis

Resiko geografis ini timbul karena sifat alam, lingkungan, dan lokasi usaha.

3. Resiko Politik

Resiko politik ini dapat dianalisis antara lain dari kestabilan politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya dari suatu daerah/negara.

4. Resiko Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Resiko ini timbul karena adanya faktor ketidakpastian yang menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang mengandung spekulasi akan mempunyai resiko yang tinggi.

5. Resiko Inflasi

Untuk mengatasi resiko ini agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan pemberian kredit perlu diperhitungkan *value of money* (nilai uang) yang diperhitungkan dalam *cost of fund/money of borrowing* agar bank tidak mengalami kerugian karena penurunan daya beli asetnya yang disalurkan dalam bidang perkreditan.

6. Resiko Persaingan

Hal yang perlu diperhatikan dari resiko ini adalah persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis yang menjadi objek perkreditan maupun persaingan antara banksendiri yang mempunyai proyek yang sama. Untuk itu dalam rangka memenangkan persaingan ini dituntut adanya sistem kerja sama yang efisien dan efektif termasuk perencanaan dalam pemberian kreditnya.

I. Penggolongan Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2012:130) untuk menentukan berkualitas atau tidak suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia (BI) menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut:

a. Lancar (*Pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening aktif, dan bagian dari kredit yang dipinjam dengan agunan tunai (*cash collecteral*)

b. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif, dan didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersandat-sandat, namun nasabah masih mampu membayar. kondisi kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi

masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makain tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

J. Prosedur Pemberian Kredit

1. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Mulyadi (2008:5) mendefenisikan prosedur sebagai berikut: “Prosedur

adalah suatu urutan klerikal atau urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara beragam.

2. Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir (2004:143) adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan Proposal hendaknya berisi

1. Latar belakang perusahaan

Seperti riwayat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termaksud pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

2. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

3. Besarnya kredit dan jangka waktu

Pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

4. Cara pemohon mengembalikan kredit

Maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

5. Jaminan kredit

Merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti dan selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang diperlukan. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

a. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto copy:

1. Akte notaris.
2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
4. Neraca dan Laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
6. Fotokopi sertifikat jaminan.

b. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1. *Current ratio*
2. *Acid test ratio*
3. *Inventory turn over*
4. *Sales to receivable ratio*
5. *Profit margin ratio*
6. *Return on net wort*
7. *Working capital*

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, jika menurut pihak bank belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Peninjauan ke Lokasi (*On the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua, wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit gunanya untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit meliputi:

- a. Akad kredit yang akan ditandatangani.
- b. Jumlah uang yang diterima.
- c. Jangka waktu kredit.
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lain

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung.
- b. Melalui Notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan.

9. Penyaluran /penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

K. Penilaian Kelayakan Kredit

Menurut Kasmir (2012:139) Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Aspek Hukum

Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah.

Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Penilaian aspek hukum ini meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- e. Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga.
- f. Dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP.

2. Aspek pasar dan pemasaran

Yang perlu diteliti pada aspek ini adalah:

- a. Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu.
- b. Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau minimal 3 tahun yang akan datang.
- c. Peta kekuatan pesaing yang ada, seperti market share yang dikuasai.
- d. Prospek produk secara keseluruhan.

3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat

dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termaksud keuntungan yang diharapkan.

4. Aspek Tekhnis dan Operasi

Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan *lay out*, serta kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pula, dengan masalah *lay out* gedung, *lay out* ruangan, dan *lay out* mesin-mesin termaksud jenis mesin dan teknologi yang digunakan.

5. Aspek Management

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.

6. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial secara umum seperti:

- a. Meningkatkan ekspor barang atau sebaiknya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
- b. Mengurangi pengangguran.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana.
- e. Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek dampak lingkungan

Untuk menilai apakah usaha yang dibuatnya sudah memiliki kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, udara, laut dan sekitarnya.

Pencemaran yang sering terjadi antara lain:

- a. Kesehatan manusia terganggu.
- b. Tanah/darat menjadi gersang dan erosi.
- c. Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau berubah rasa atau menyebabkan banjir.
- d. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas.
- e. Mengubah tatanan adat istiadat setempat.

L. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2012:148) dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak Pebankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang harusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan

Nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet, dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

b. Adanya unsur tidak sengaja

Nasabah mau membayar tapi tidak mampu, sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuannya untuk membayar kredit tidak ada.

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya melakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Menurut Rivai, Basir, dan Sudarto, Veithzal (2012:242) penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penagihan intensif oleh bank;
2. *Rescheduling*

Ialah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu termasuk *Grace Period*, baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak. Tindakan *Rescheduling* dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang baik.

3. *Reconditioning*

Ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebahagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Tindakan *Reconditioning* diberikan kepada debitur karena masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik

4. *Restructuring*

Ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling*, dan *reconditioning*. Tindakan *restructuring* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai iktikad baik melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

5. *Manajemen Assistancy*

Yaitu bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah di dalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan petugas bank, maupun bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

6. Penyertaan bank

Adalah penempatan dana dalam bentuk saham yang dilakukan tidak melalui pasar modal. Bank dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan izin dari Bank Indonesia.

M. Pengawasan Kredit

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usahanya yaitu tahap pengawasan. Demikian juga di dalam perkreditan karena kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan melalui perkreditan. Kegiatan pengawasan ini menjadi lebih penting bila kita ketahui bahwa kredit merupakan kekayaan yang beresiko (*Risk Assets*) bagi bank karena asset tersebut akan dikuasai oleh pihak luar yaitu nasabah.

Menurut Safri (2001 : 10) Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan mencakup upaya memeriksa, apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Pengawasan kredit dilakukan terhadap :

- a. Mutasi dari rekening koran nasabah.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui sirkulasi penarikan dana dari dan ke rekening nasabah yang meminta kredit. Dari mutasi

rekening koran ini bank dapat melihat apakah perputaran keuangan dalam rekening nasabah telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

b. Kegiatan usaha dan kemajuan usaha nasabah.

Kegiatan usaha nasabah dapat dilihat dari laporan-laporan yang diminta dari nasabah antara lain :

a) Laporan produksi.

Laporan ini berisikan kegiatan produksi setiap bulan. Data tentang kapasitas produksi dibandingkan dengan data yang diberikan nasabah ketika mengajukan permohonan kredit.

b) Laporan penjualan.

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan penjualan perusahaan setiap bulannya. Dari laporan penjualan ini bank dapat menilai realisasi rencana-rencana yang diajukan nasabah.

c) Laporan keuangan.

Merupakan informasi yang menyeluruh untuk mengetahui posisi keuangan dan keadaan usaha dalam suatu periode pembukuan.

c. Meninjau langsung ketempat usaha nasabah

Tujuan dari tinjauan langsung ini adalah :

a) Untuk melihat secara langsung keadaan usaha nasabah, apakah berjalan lancar atau mengalami kemunduran.

b) Untuk membuktikan kebenaran dari seluruh laporan nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan usaha secara fisik.

c) Untuk memberikan saran-saran dan pembinaan bila terjadi hambatan

dalam menjalankan usaha.

Dengan informasi yang diperoleh dari peninjauan langsung, maka bank dapat mengetahui keadaan usaha nasabah yang sebenarnya. Apabila ditemukan adanya hambatan didalam mengelola kredit yang diberikan, maka bank akan mengambil tindakan untuk mengamankan kredit tersebut.

Sarana pengawasan dalam pemberian kredit sama halnya dengan sarana administrasi kredit, yang mempunyai beberapa tingkatan yang dimulai dengan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan pada umumnya dan kegiatan perkreditan pada khususnya, setelah itu perangkat peraturan dan kebijaksanaan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Menurut Djohan (2000) Agar ketentuan-ketentuan dalam prosedur pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, perlu dituangkan kedalam bentuk sarana pengawasan yang terdiri dari :

- a. Sarana perangkat keras, yang terdiri dari :
 - a) Berbagai bentuk standarized form.
 - b) Berbagai alat tulis kantor, karbonazed paper.
 - c) Peralatan kantor untuk mendeteksi dokumen palsu.
 - d) Alat-alat komunikasi untuk penyampaian informasi secara cepat, aman dan rahasia.
 - e) Filling cabinet yang memadai untuk melindungi dokumen-dokumen perkreditan.
 - f) Alat-alat transportasi untuk pelaksanaan inspection on the spot.

b. Tenaga kerja, sebagai operator dan manajer.

c. Perangkat lunak.

Agar perangkat keras dan tenaga kerja dapat bekerja dengan baik dan terarah, maka perlu ada sekumpulan aturan yang disusun secara sistematis. Perangkat lunak sebagai alat pengawasan meliputi :

- a) *Manual of Operation*, yaitu pedoman kerja yang dapat dianggap sebagai tolok ukur pelaksanaan kerja.
- b) Struktur organisasi dan pembagian kerja.
- c) Sistem dan prosedur kerja yang sistematis untuk memudahkan semua pihak dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- d) Pendidikan pegawai, sebagai salah satu syarat internal control yang baik untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawabnya.
- e) *Job rotation* dan cuti pegawai.
- f) Anggaran, rencana kerja yang dimanifestasikan dalam satuan nilai uang.

Pelaksanaan pengawasan kredit harus dapat dijalankan dengan efisien karena luasnya ruang lingkup, serta banyaknya objek dan subjek yang harus diawasi sementara tenaga kerja dan waktu sangat terbatas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh antara lain adalah pengajuan permohonan kredit, survey dan analisa kredit, analisa kredit, rekomendasi kredit, persetujuan dan keputusan komite kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit dan pembukuan, dan pengarsipan (*filling*). Prosedur Pengawasan Kredit dilakukan setelah kredit diberikan kepada nasabah untuk menghindari terjadinya resiko kredit bermasalah. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh antara lain, monitoring dari dalam dan luar lingkungan perusahaan.
2. Upaya yang dilakukan PT. BPR Pembangunan Nagari dalam menangani nasabah yang telah melewati tanggal jatuh tempo atau memasuki daftar lelang adalah dengan memberikan surat pemberitahuan tunggakan kewajiban dan tiga kali surat teguran. Pertama dengan mengirim surat pemberitahuan tunggakan dengan jangka waktu peringatan selama 1 (satu) minggu. Kedua, memberi tahu nasabah dengan cara mengirim surat peringatan 1 (pertama) dengan jangka waktu peringatan 1 (satu) minggu. Ketiga, mengirim kembali surat peringatanke 2 (dua) kepada nasabah dengan jangka waktu peringatan selama

1 (satu) minggu. Keempat, mengirim surat peringatan terakhir kepada nasabah kredit. Apabila sampai tanggal jatuh tempo pihak nasabah kredit tidak memperpanjang kredit, maka pihak kredit PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dengan peraturan yang berlaku berhak melakukan penjualan barang jaminan secara lelang.

3. Kebijakan yang dilakukan oleh PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dalam mengatasi kredit yang bermasalah adalah melakukan tindakan penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) kredit. Apabila cara di atas tidak dapat dipenuhi oleh debitur, maka PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh melakukan penyitaan barang jaminan.

B. Saran

1. Diharapkan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dalam pemberian kredit kepada calon debitur, terutama pejabat bank bagian kredit dalam melaksanakan analisis sistem dan tata cara *c's of credit* (*character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*) diharapkan melakukan analisis tersebut dengan lebih cermat dan teliti. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau macet pada masa yang akan datang, karena berhasil tidaknya penyaluran kredit bank dapat memengaruhi kredibilitas bank yang bersangkutan.

2. Diharapkan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh dapat terus mengacu pada prosedur pemberian kredit secara umum, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih calon debitur.
3. Diharapkan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh sebaiknya melakukan pengawasan terhadap kredit yang diberikan kepada para nasabah terutama nasabah yang baru apakah pemanfaatan kredit yang diberikan sesuai dengan kegunaan yang tercantum dalam akad kredit dan PT. BPR Pembangunan Nagari Manggopoh harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan kredit guna meminimalkan resiko kredit macet.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur pemberian dan pengawasan kredit untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Ed 2. Yogyakarta: Andi
- Djohan, Warman. 2000. *Kredit Bank*. Jakarta: PT. Muhara Sumber Widya
- FE. UNP. 2012. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Padang: UNP
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Ed. Revisi 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2008). *Manajemen Perbankan*. Ed. Revisi 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- PT. BPR Pembangunan Nagari (2009) *Pedoman Umum Perkreditan Rakyat*
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan : CV. Alfabeta
- Syafri, H. Sofyan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Veithzal, Rivai. et, al (2012). *Commercial Bank*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada